

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengemukakan kesimpulan mengenai hal-hal pokok yang telah penulis bahas pada pembahasan sebelumnya terutama mengenai pemenuhan syarat hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Beberapa kesimpulannya yaitu: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memenuhi syarat hal ihwal kegentingan yang memaksa berdasarkan 3 (tiga) parameter syarat kegentingan memaksa sesuai dengan putusan Mahkamah Kontitusi nomor 138/PUU-VII/2009, dapat dilihat pada Penjelasan Point per Point yang telah Penulis uraikan pada Bab sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut Penulis berpendapat, Pemerintah tidak cermat dalam memenuhi syarat fomil kegentingan yang memaksa dalam penetapan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 terutama dalam hal ini Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain itu, Perppu Kpk juga tidak memenuhi beberapa Materi muatan yang harus mencerminkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, baik dari segi asas, norma atau kaidah yang termuat dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas, penulis memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini Presiden agar mempertegas dan mencermati syarat formil kegentingan yang memaksa dalam penerbitan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berdasarkan putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009.

2. Presiden dan DPR agar merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan mengadopsi ketentuan 3 parameter kegentingan yang memaksa dalam penetapan sebuah Perppu berdasarkan pada putusan MK nomor 138/PUUVII/ 2009.

- a. Presiden dalam hal membuat suatu Perppu agar memperhatikan materi muatan didalamnya agar tidak menyelisih UU yang menjadi dasar pembentukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashiddiqie, Jimly. 2011, *Perihal Undang-undang*, Rajawali Pers, Jakarta
- A. Tauda, Gunawan. 2012, *Komisi Negara Independen*, Genta Press, Yogyakarta
- Arifin, Firmansyah. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antara Lembaga Negara*, Konsorsium Revormasi Hukum Nasional, Jakarta
- Ashiddiqie, Jimly. 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, PT. Raja Grafindo Persaja, Jakarta
- Cahaya, Suhandi Dan Surachmin, 2013, *Strategi Dan Tehnik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Djaja, Ermansjah. 2013, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hadjon, Philipus. 2011, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Huda, Ni'matul. 2007, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta
- Indrati, Maria. 1996, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Konsorsium Ilmu Hukum, Jakarta
- Indrati, Maria Farida. 2007, *Ilmu perundang-undangan*, PT. Kanisius, Yogyakarta
- Kansil, C.S.T. 1982, *Praktek Hukum Peraturan Perundangan di Indonesia*, Erlangga, Jakarta
- Kelsen, Hans. 1982, (D) *Reine Rechtslehre* (Ajaran hukum murni), Wien
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2004, *Filsafat Hukum*, PT.Grasindo, Jakarta
- Malian, Sobirin. 2011, *Perkembangan Lembaga-lembaga Negara Indonesia*, Total Media, Yogyakarta
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Pope, J. 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Salman, Otje. 2010, *Filsafat Hukum*, Reflika Aditama, Bandung
- Sidharta, Arief. 1999, *Refleksi tentang hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Soekanto, Soerjono dan Purbacaraka, Purnadi. *Perihal Kaidah Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Soekanto, Soerjono. 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta

Sunggono, Bambang. 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press,

Wantu, Fence dkk. 2012, *Psikologi Anti Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,

Perppu No. 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Hirarki Perundang-Undangan

Perppu No. 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

INTERNET

<http://m.hukum.online.com.2015/11.html>. diakses pada tanggal 11 November 2015

<http://.m.cnn.indonesia.com/nasional.html>. diakses pada tanggal 11 November 2015

<http://Indraronto.blogspot.co.id/2014/03/asas-asas-pembentukan-peraturan.html>. diakses pada tanggal 2 Januari 2016

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/peraturan_pemerintah_pengganti_undang_undang_\(Indonesia\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/peraturan_pemerintah_pengganti_undang_undang_(Indonesia)) diakses pada tanggal 2 Januari 2016

<http://nvy03.blogspot.co.id/2010/07/perbedaan-uu-dengan-perppu.html>. diakses pada tanggal 2 Januari 2016

<http://m.republika.co.id> diakses pada tanggal 21 Maret 2016

<http://m.hukum.online.com.2015/11.html>, diakses tanggal 25 maret 2016

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae



Nama : Silvie Luciana Mohammad

TTL : Gorontalo, 29 Juni 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Orang Tua : Ayah : Arifin Mohammad

Ibu : Hesty Djafar

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Sasuit Tubun, Kel. Tenda, Kec. Hulondalangi,
Kota Gorontalo.

Pendidikan

NO	TAHUN MASUK	TAHUN LULUS	PENDIDIKAN
1	2002	2006	SDN No. 37 Kota Gorontalo
2	2006	2009	SMPN 5 Gorontalo
3	2009	2012	SMKN 1 Gorontalo
4	2012	2016	Universitas Negeri Gorontalo

❖ **Kegiatan Yang Pernah Diikuti**

1. Peserta MOMB (Masa Orientasi Mahasiswa Baru) Tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo
2. Peserta Soft Skill MOMB Tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo
3. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet Tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo
4. Peserta Pemilihan Putra Putri FIS Tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo
5. Peserta Debat Hukum Tahun 2013 di Universitas Negeri Gorontalo
6. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung Tahun 2014 di Jakarta
7. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Tahun 2012
8. Peserta PKL di PTUN Manado Tahun 2014
9. Peserta Seminar Nasional Oleh “Sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI, Dan Bhineka Tuggal Ika Tahun 2015 di Universitas Negeri Gorontalo